

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu : neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 yang sudah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami.

Fahmi (2011:28) tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak

saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

PSAK No.1 (2015:3) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terhadap empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Tabel 1.1
Jenis Opini BPK

Opini BPK	Keterangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan. - Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)

Wajar dengan Pengecualian (WDP)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengendalian internal memadai, tetapi terdapat salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan. - Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian internal yang sangat lemah. - Dalam kondisi demikian, auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. - Dalam hal ini, auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
Tidak Wajar (TW)	<ul style="list-style-type: none"> - Jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan. - Dengan demikian, secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Sumber : Marta (2017)

Fenomena yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung pada tahun 2017 adalah “Laporan Keuangan WDP lagi, Ridwan Kamil Tetap Optimis”. Wali Kota Bandung yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil ini dapat menjadi indikasi rendahnya kualitas laporan keuangan dari institusi tersebut.

Rendahnya kualitas laporan keuangan Kota Bandung, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah (SAP), penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan (Syafrudin, 2012). Fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung terkendala pencatatan aset yang masih belum dilengkapi, sehingga salah satu karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yakni harus disajikan dengan lengkap belum terpenuhi.

Kasus mengenai Pengelolaan CSR pada Pemkot Bandung juga menunjukkan adanya ketidaktaatan pada perundang-undangan. Pengelolaan CSR yang diduga melanggar hukum. Pengelola dana sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung. Dana dari pihak swasta yang bersifat hibah seharusnya diberitahukan ke DPRD. Bahkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) seharusnya tidak dikelola oleh pemkot, namun dana itu diberikan perusahaan langsung ke warga sekitar. Selain itu, selama dua tahun ini, pengelola CSR dan

hibah dari pihak ketiga pengelolaannya dihitung tak transparan dan akuntabel. DPRD Kota Bandung pun sama sekali belum pernah menerima laporan soal berapa banyak dana CSR dan hibah yang sudah diterima Pemkot Bandung, baik itu tahun 2014 maupun 2015. Dari itulah Pemkot Bandung dinilai telah melanggar Peraturan Daerah (Perda). Setidaknya jika merujuk pada Perda No 09 tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Bandung, disebutkan kewajiban Pemkot Bandung memberi laporan kepada DPRD terkait penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam pasal 5 Perda No 09 Tahun 2005. (Supriadi, 2015).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di pemerintah Kota Bandung dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah kota Bandung, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal belum berkualitas karena masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yang diisyaratkan, sehingga pemerintah perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar laporan keuangan yang berkualitas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. SIA merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output

yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan, 2011).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Bastian (2010:4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan SPI disetiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintah, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan daerah masih ada yang kurang kompeten. Ini diartikan bahwa belum adanya kesadaran dari tiap-tiap individu yang berada dilingkungan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap *good governance* (Gumilar, 2013).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan. Terbatasnya pegawai dan latar

belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Yusrawati, 2015).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal dan Suparno (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Adapun perbedaan penulisan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian. Peneliti sebelumnya meneliti di SKPD Kota Banda Aceh, sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kota Bandung. Dalam hal ini SKPD Kota Banda Aceh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh memberikan opini WTP 5 kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. (acehtribunnews, 2016). Sedangkan Pemerintah Kota Bandung adalah Laporan Keuangan Pemkot Bandung sampai saat ini belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-

RI. Pasalnya, dari hasil penilaian BPK, Kota Bandung masih terganjal masalah aset. Menurut Arman Syifa terdapat beberapa aset yang tidak diketahui keberadaannya dan pemanfaatannya pun masih belum jelas. Masalah aset tersebut telah memenuhi ambang batas yang ditentukan, padahal permasalahan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. (Supriadi, 2017).

Alasan penulis memilih variabel pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan adalah, adanya ketidak konsistensian hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian Nurendah Ragillita Untary (2015) sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desiana Anugerah Budiawan (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian Abdul Hakim (2017) sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil

penelitian, Yusar Sagara (2015) kompetensi sumber daya manusia tidak pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang mendorong peneliti untuk memfokuskan seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang berada di Pemerintah Kota Bndung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Seberapa besar penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sistem pengendalian internal pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian

internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintah di Indonesia pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam bidang sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah daerah mengenai masalah penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada SKPD yang ada di Pemerintah Kota Bandung. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai, untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.